

LAPORAN

2020

KINERJA



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Laporan Kinerja

Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan

Tahun 2020



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	5
E. Isu-isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	39
C. Evaluasi atas Capaian IKU.....	40
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Uraian Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	5
Tabel I.2	Rincian Anggaran TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan..	7
Tabel II.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	14
Tabel II.2	Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	15
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	19
Tabel III.2	Perbandingan Realisasi IKU 1 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	21
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi IKU 2 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	22
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi IKU 3 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	23
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi IKU 4 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	25
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi IKU 5 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	26
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi IKU 6 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	27
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi IKU 7 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	28
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi IKU 8 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	30
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi IKU 9 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	32
Tabel III.11	Perbandingan Realisasi IKU 10 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	33
Tabel III.12	Perbandingan Realisasi IKU 11 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	35
Tabel III.13	Perbandingan Realisasi IKU 12 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	37
Tabel III.14	Perbandingan Realisasi IKU 13 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024.....	39
Tabel III.15	Revisi Pagu Anggaran TA 2020.....	39
Tabel III.16	Anggaran dan Realisasi TA 2020.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	4
Gambar I.2	Pejabat Struktural dan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	6
Gambar I.3	Fasilitas Internal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	8
Gambar I.4	Fasilitas Eksternal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	8
Gambar II.1	Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	12
Gambar II.2	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	13
Gambar III.1	<i>Screenshot</i> Aplikasi E-Wako.....	36
Gambar III.2	Pemberitaan Peluncuran Aplikasi E-Wako di Media <i>Online</i>	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Profil Demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.....	6
Grafik III.1	<i>Trend</i> Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam Tiga Tahun Terakhir.....	23
Grafik III.2	<i>Trend</i> Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dalam Tiga Tahun Terakhir.....	28
Grafik III.3	<i>Trend</i> Hasil Evaluasi AKIP dalam Tiga Tahun Terakhir.....	30
Grafik III.4	<i>Trend</i> Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Tiga Tahun Terakhir.....	31
Grafik III.5	<i>Trend</i> Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran dalam Tiga Tahun Terakhir.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Target Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
- Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
- Lampiran 3. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan Target Lima Tahun
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

KATA PENGANTAR



Pada tahun anggaran 2020, proses pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, serta adanya kondisi pandemi Covid-19, yang selanjutnya menetapkan tema dan kebijakan, yaitu “Menanggulangi Wabah Pandemi COVID 19 dan Akselerasi Pemulihan Ekonomi”. **Akselerasi Pemulihan Ekonomi** menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya sebagai institusi yang mempunyai peran penting dalam memeriksa keuangan negara/daerah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga turut memeriksa program pemerintah terkait penanganan wabah covid 19, dan sekaligus berkomitmen selalu mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah yang inklusif dan berkeadilan, serta mengawasi pengeluaran APBD agar tetap sehat sehingga berkesinambungan. Dalam upaya mendukung program Pemerintah Sulawesi Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan berbagai rencana pemeriksaan dan inovasi pemeriksaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam sasaran pada Rencana Kerja (Renja) dan Kontrak Kinerja tahun 2020. Pencapaian sasaran selanjutnya diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh unit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian sasaran ini juga didorong dengan penerapan integrasi antara kinerja dan risiko yang telah dilakukan. Setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan dibuatkan mitigasi secara efektif. Untuk monitoring dan evaluasi capaian IKU, inisiatif strategis, isu strategis, serta risiko, dilakukan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap triwulan.

Laporan kinerja tahun 2020 merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* yang diperoleh. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 98,96 dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.322.992.442,00 atau sebesar 91,30% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp33.212.043.000,00 (revisi). Pencapaian kinerja tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan skor dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja di tahun 2019 sebesar 101,14.

Di tahun 2020 terdapat salah satu pencapaian kinerja yang sangat membanggakan yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai satuan kerja kategori Instansi Vertikal yang patuh menyampaikan laporan permintaan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020). Selain itu di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan *launching* layanan pengaduan masyarakat E-Wako (Elektronik Wadah Komplain) yang merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*. E-Wako ini bertujuan untuk mengakomodir aspirasi pengaduan masyarakat di kondisi pandemi saat ini, serta merespon pengaduan masyarakat yang masuk dengan tepat dan cepat.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan tata kelola internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk dari pengimplementasian *core values* BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan baik seluruh Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Akhir kata, laporan kinerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan umpan balik bagi instansi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.

Makassar, 29 Januari 2021

Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II huruf d disebutkan, bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satuan kerja menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kecuali Pemeriksaan Investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas akan menghasilkan *output*/keluaran yang akan menjadi bagian dari *output*/keluaran BPK. *Output* tersebut meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik pemeriksaan keuangan, kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu;
2. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah;
3. Rumusan usulan bahan pendapat BPK;
4. Usulan Temuan yang berindikasi mengandung tindak pidana korupsi untuk diserahkan ke APH;
5. Laporan penghitungan kerugian negara/daerah;
6. Pemberian keterangan ahli;
7. Dokumen-dokumen perencanaan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berupa Prognosis anggaran, RKP, RKSP, TOR Kegiatan, dan DIPA Perwakilan beserta perubahannya;
8. *Database* meliputi *database* SDM, Sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemantauan, entitas, dsb;

9. Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
11. Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan yang dikelola BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
12. Laporan Berkala (bulanan) atas pelaksanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, BPK telah merumuskan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Renstra dan RIR BPK, Rencana Kerja Tahunan, dokumen penganggaran dan dokumen perjanjian kinerja (PK). Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen–dokumen tersebut, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja yang merupakan laporan akuntabilitas Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satker. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga mengelola Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) sebagai bentuk dukungan atas akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan seperti tercantum dalam **Lampiran XXXVII** Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut:

Gambar I.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Struktur di atas menggambarkan bahwa Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

- b. Subbagian Sumber Daya Manusia
 - c. Subbagian Keuangan
 - d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
 - e. Subbagian Hukum
2. Subauditorat Sulawesi Selatan I
 3. Subauditorat Sulawesi Selatan II
 4. Subauditorat Sulawesi Selatan III
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sumber Daya Manusia

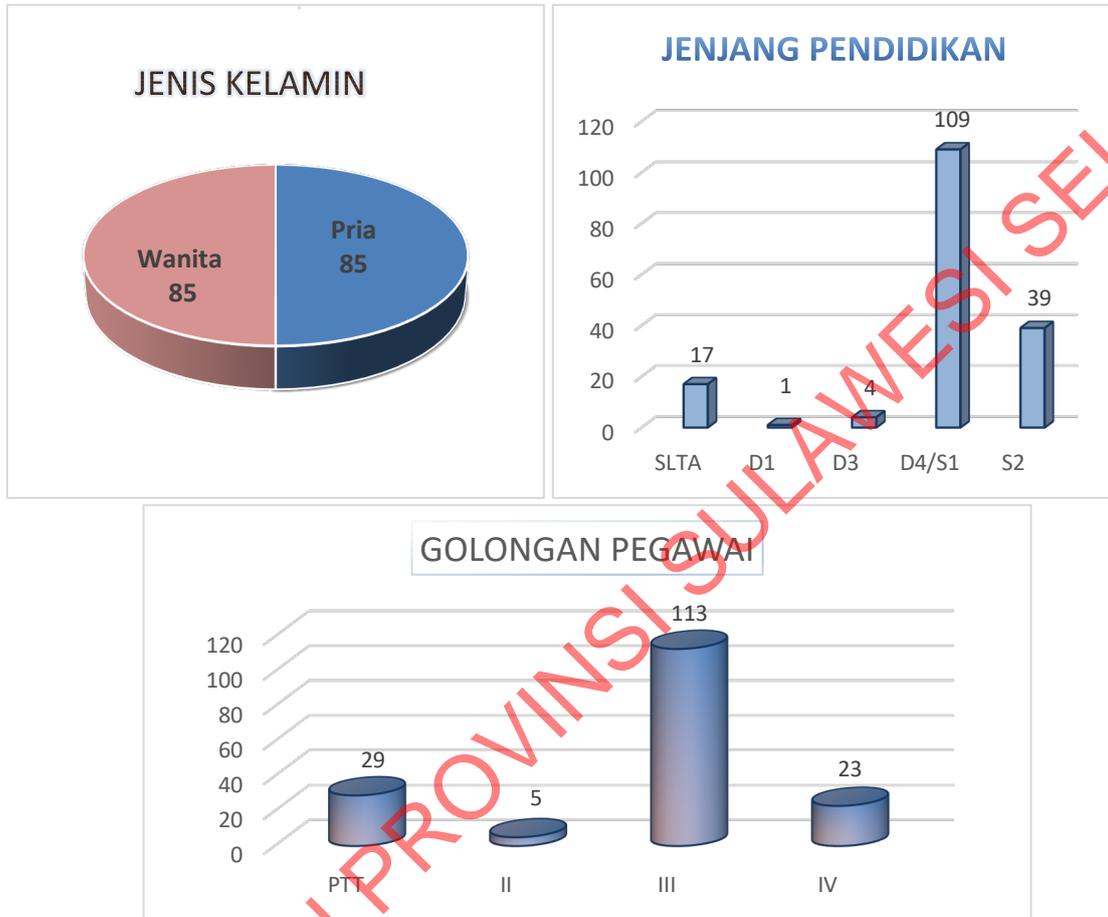
Dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki dukungan sumber daya manusia berjumlah 170 pegawai (data per Januari 2021), dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I.1. Uraian Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian Jabatan	Jumlah Personel
Pejabat Struktural		
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Subauditorat	2
4	Kepala Subbagian	5
Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)		
5	Pemeriksa Madya	15
6	Pemeriksa Muda	35
7	Pemeriksa Pertama	52
Pegawai Non Pemeriksa		
8	Analisis Hukum	2
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2
10	Pengelola Barang Milik Negara	1
11	Pranata Kearsipan	3
12	Pengelola Keuangan	3
13	Pengelola Kepegawaian	6
14	Pengelola TI	1
15	Pengelola Layanan Kehumasan	4
16	Sekretaris	2
17	Pengadministrasi Umum	5
18	Analisis Pengembangan Kompetensi	1
19	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	29
Total		170

Profil demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan golongan pegawai dijabarkan sebagai berikut:

Grafik I.1 – Profil Demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar I.2. Pejabat Struktural dan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



2. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 awalnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp36.802.032.000,00 dan kemudian mengalami beberapa kali revisi menjadi sebesar Rp33.212.043.000,00 yang terdiri dari Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp20.632.749.000,00 dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp12.579.294.000,00. Adapun rincian anggaran berdasarkan rencana kegiatan di BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2. Rincian Anggaran TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kegiatan	Anggaran
A	Rencana Kegiatan Pemeriksaan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	12.579.294.000,00
1	LHP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	4.858.381.000,00
2	LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK	669.238.000,00
3	LHP Banpol	385.627.000,00
4	LHP Interim/Pendahuluan	3.660.713.000,00
5	Rumusan Bahan Pendapat	8.305.000,00
6	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1.778.746.000,00
7	Sumbangan IHPS	152.652.000,00
8	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	964.662.000,00
9	Laporan Profil Entitas	100.970.000,00
B	Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (1+2+3)	20.632.749.000,00
1	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.498.794.000,00
2	Layanan Internal <i>Overhead</i>	3.385.304.000,00
3	Layanan Perkantoran	15.748.651.000,00
TOTAL (A+B)		33.212.043.000,00

3. Sarana Prasarana

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020, selain didukung oleh SDM dan Anggaran, juga ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana sebagai salah satu aspek penunjang dalam proses pencapaian tujuan

kinerja dikelola untuk memfasilitasi baik pihak internal dhi. Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak eksternal dhi. *stakeholder* (masyarakat, APH, media dan LSM, *auditee*).

Fasilitas internal yang tersedia untuk Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain: Ruang Kerja, Ruang Rapat, Rumah Dinas bagi Pejabat Struktural, Mess Pegawai, Pusat Pelayanan Konsultasi Pegawai/*Employee Care Centre* (ECC), Tempat Penitipan Anak (TPA Tunas Bangsa), Poliklinik Umum dan Gigi, Lapangan Olahraga (*indoor* dan *outdoor*).

Gambar I.3. Fasilitas Internal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Sedangkan fasilitas eksternal yang tersedia antara lain: Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Perpustakaan, Ruang Pers, Ruang Parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas dan Perempuan, Masjid.

Gambar I.4. Fasilitas Eksternal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan





E. Isu-isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 antara lain:

1. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Peningkatan penyelesaian tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi salah satu agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan terus berupaya mendorong entitas pemeriksaan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan juga meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

2. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta mendukung adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berharap agar program Pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat dan pengelolaan atas program tersebut dilakukan dengan transparan sehingga meminimalkan penyimpangan keuangan daerah dan berharap agar BPK Perwakilan Sulawesi Selatan memeriksa pelaksanaan tersebut dengan optimal.

Di tahun 2020, selain melaksanakan *mandatory audit* yaitu pemeriksaan laporan keuangan dan tematik nasional bersama dengan BPK Pusat, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan juga melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan isu yang berkembang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Parepare dan Kabupaten Toraja Utara.

3. Integrasi Sistem Informasi BPK

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

4. Peningkatan kompetensi SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK, dan juga melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa dan non pemeriksa. Selain itu, untuk mendukung arah kebijakan pemeriksaan yang selaras dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) dan juga merespon isu-isu lokal, dilaksanakan pendidikan pelatihan dengan tema dan fokus pada perkembangan yang terjadi di Pemerintah Daerah.

5. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya harus memperhatikan pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.

6. Penerapan Manajemen Pengetahuan yang Belum Optimal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengetahuan, baik itu mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik, maupun melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra BPK 2020-2024 menjabarkan visi, misi, dan tujuan BPK untuk periode 2020-2024. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis BPK. Agar sasaran strategis dan tujuan BPK tercapai maka diperlukan arah kebijakan dan strategi. BPK menetapkan dua arah kebijakan yang terdiri dari strategi-strategi untuk mendukung arah kebijakan. Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II.1 – Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



Sebagai unit kerja pemeriksaan yang berada di bawah naungan Auditorat Keuangan Negara VI, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yakni meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, dan juga mendukung mendukung strategi BPK yakni strategi 2-Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menetapkan

sasaran sebagai berikut (1) Meningkatnya pemeriksaan berkualitas, dan (2) Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar II.2 – Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (Auditor Utama KN VI) serta diketahui oleh Anggota VI, Wakil Ketua, dan Ketua BPK.

Dalam Perjanjian Kinerja tercantum sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020, serta alokasi anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pencapaian target tahun 2020. Berikut rincian sasaran strategis, indikator kinerja, target IKU 2020, serta alokasi anggarannya:

Tabel II.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp33.212.043.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp12.579.294.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp20.632.749.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	

Untuk mencapai target kinerja tersebut, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menetapkan rencana aksi per triwulan atas pelaksanaan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja. Adapun rencana aksi pelaksanaan Perjanjian Kerja 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 – Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2020

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Kepala Perwakilan. - Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan berjenjang dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab, hingga Penanggung Jawab. - Mewajibkan tim pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan KKP dan menyimpan secara elektronik.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	100%	100%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). - Penerbitan LHP dengan simpulan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2)
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan bahan dalam rangka pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK. - Pelaksanaan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I 2020. Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan bahan dalam rangka pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK. - Pelaksanaan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II 2020.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I-II: - Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pemeriksaan Interim Tematik Nasional. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional. - Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> - Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. - Melaksanakan koordinasi terkait permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. - Melaksanakan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I-IV: - Tidak merencanakan pemeriksaan tematik lokal pada tahun 2020
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I-III: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perwakilan terkait visi, misi, nilai dasar BPK, dan kode etik BPK baik dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada seluruh pegawai sebagai responden untuk mengisi survei terkait implementasi nilai dasar BPK

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember	<p>Triwulan I-III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Itama terkait Reviu LAKIP TA 2019 - Menindaklanjuti Konsep Hasil Reviu LAKIP TA 2019 - Evaluasi atas Hasil Reviu LAKIP TA 2019 sebagai Acuan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Tahun 2020
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	<p>Triwulan I-IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di Subbag dan Subauditorat Perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memilih praktik yang akan diajukan sebagai usulan <i>Best Practice</i> - Melakukan seleksi atas <i>best practice</i> yang dipilih oleh Revbang untuk direplikasi oleh Perwakilan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Usulan Pengajuan <i>Best Practice</i> - Memilih <i>Best Practice</i> yang tepat untuk direplikasi di Perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengirim usulan pengajuan <i>best practice</i> ke Ditama Revbang sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. - Penyampaian nota dinas dan dokumen pendukung ke Ditama Revbang terkait <i>best practice</i> yang dipilih untuk direplikasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan 3,80	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Triwulan I-III: <ul style="list-style-type: none"> Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan untuk mengisi kuesioner terkait tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pegawai Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan/diklat bagi pemeriksa minimal 40 jam pelajaran dalam 1 tahun dan bagi non pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Menyusun laporan keuangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Pencapaian skor kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 berdasarkan hasil validasi Semester II tahun 2020 oleh Direktorat PSMK adalah sebesar 98,96. Skor kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja di tahun 2019 yaitu sebesar 101,14. Capaian masing-masing indikator kinerja BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 – Capaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor	
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.212.043.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp12.579.294.000 • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp20.632.749.000 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	78,00%	78,00
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	76,33%	101,78
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,11%	101,11
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,43	88,60
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (94,41)	105,00
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,99%	104,20
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	125,00%	105,00
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,55	93,42
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	92,25%	105,00
Total Skor					98,96

Berikut ini rincian skor dan target IKU Tahun 2020 Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, beserta gambaran skor dan target IKU selama tiga tahun terakhir dan perbandingan realisasi IKU Tahun 2020 dengan Target 2024 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024.

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU 1	
Pemenuhan Pemerolehan Pemeriksaan	Pengendalian Keyakinan dan Mutu
Target	100,00%
Realisasi	78,00%
Capaian	78,00

IKU 1 mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC), dan eksternal satuan kerja melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Realisasi IKU 1 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,00% dari target sebesar 100,00%. Realisasi tersebut diperoleh dari internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC), dan eksternal satuan kerja melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil QA dan QC Satker: 100%
- 2) Hasil Evaluasi EPP: 56%
- 3) Hasil Reviu Itama (Individual Score): 100%

Tahun-tahun sebelumnya pengukuran terkait mutu pemeriksaan diukur melalui IKU pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, sedangkan tahun 2020 ini IKU yang mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dinilai dari 3 sub iku yaitu internal satuan kerja melalui sub iku hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC), dan eksternal satuan kerja melalui sub iku hasil evaluasi EPP dan sub iku hasil reviu Itama. Oleh karenanya, IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.2 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 belum tercapai dengan baik, yaitu sebesar 78,00%.

Tabel III.2 – Perbandingan Realisasi IKU 1 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	78,00%	78,00%

Untuk meningkatkan pencapaian IKU 1, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan dan *reward* penilaian kualitas LHP;
2. Melaksanakan kegiatan *training* atau pun *coaching* untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan IKU 1, di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan revisi pagu anggaran pada Belanja-Keluaran LHP.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2	
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	
Target	100,00%
Realisasi	100,00%
Capaian	100

IKU 2 menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Penilaian IKU 2 berasal dari laporan evaluasi EPP. Realisasi IKU 2 tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.3 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 100,00%.

Tabel III.3 – Perbandingan Realisasi IKU 2 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mempertahankan pencapaian IKU 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan rutin dan strategis seperti peningkatan pelaksanaan evaluasi LHP dalam tingkat kesesuaian simpulan dan program pemeriksaan melalui kegiatan *coaching*.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan IKU 2, di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan revisi pagu pada Belanja Keluaran LHP.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Target	75,00%
Realisasi	76,33%
Capaian	101,78

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sumber data yang digunakan untuk untuk penilaian IKU 3 adalah data pemantauan tindak lanjut yang berasal dari dari aplikasi SMP.

Realisasi IKU 3 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 76,33% dari target sebesar 75,00%. Capaian tersebut diperoleh dari data pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I TA 2020 dengan total jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas sebanyak 20.228 rekomendasi; 15.198 rekomendasi diantaranya telah selesai ditindaklanjuti; 3.754 rekomendasi dengan status belum selesai atau dalam proses; 1.033 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 243 jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Realisasi IKU 3 tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2019 dan 2018. Hal tersebut bisa dilihat dalam grafik III.1 yang menggambarkan *trend* persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tiga tahun terakhir.

Grafik III.1 - *Trend* Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam Tiga Tahun Terakhir



Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.4 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 belum tercapai baik, yaitu sebesar 97,85%.

Tabel III.4 – Perbandingan Realisasi IKU 3 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU	Target Tahun	Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	76%	77%	78%	76,33%	97,85%

Untuk meningkatkan realisasi IKU 3, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis seperti penyempurnaan komunikasi dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan melalui kegiatan:

1. Peningkatan kegiatan komunikasi dengan *auditee* untuk memperoleh informasi terkait status TL rekomendasi melalui forum PTL;

2. Penyempurnaan dan optimalisasi SiPTL;
3. Identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai signifikan;
4. Peningkatan kompetensi dalam melakukan evaluasi rekomendasi TL melalui training dan bimbingan (*coaching*).

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran terkait IKU 3, selama tahun 2020 pelaksanaan kegiatan PTLHP Semester I dan II dilaksanakan secara daring selama masa pandemi Covid-19.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU 4	
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	
Target	100%
Realisasi	101,11%
Capaian	101,11

IKU 4 menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. IKU 4 bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Di tahun 2020, dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanganan Covid-19, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan turut serta dalam melakukan Pemeriksaan Kinerja dan DTT terkait penanganan Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemeriksaan Kinerja terkait penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemeriksaan Kinerja terkait penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Maros.

Realisasi IKU 4 tahun 2020 adalah sebesar 101,11% dari target sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi pemeriksaan tematik nasional: 4,00
- 2) Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional: 4,00
- 3) Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan: 1,11%

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.5 menunjukkan bahwa realisasi IKU 4 di tahun 2020 ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai cukup baik, yaitu sebesar 101,11%.

Tabel III.5 – Perbandingan Realisasi IKU 4 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2019	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,11%	101,11%

Untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 4, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis seperti pengembangan kapasitas pemeriksaan tematik nasional melalui peningkatan jumlah pemeriksaan tematik nasional sesuai fokus pemeriksaan 2020-2024.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan IKU 4, di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan revisi pagu pada Belanja Keluaran LHP. Sebagian besar pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara daring selama masa pandemi Covid-19.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU 5	
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	
Target	100,00%
Realisasi	100,00%
Capaian	100

IKU 5 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. IKU 5 bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Selama tahun 2020 belum ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi IKU 5 tahun 2020 adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.6 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai cukup baik, yaitu sebesar 100%.

Tabel III.6-Perbandingan Realisasi IKU 5 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU 5 mendorong pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan strategi pemeriksaan melalui sosialisasi tema dan fokus pemeriksaan;
2. Penyusunan RKT pemeriksaan dengan memperhatikan: fokus pemeriksaan yang terdapat dalam Renstra, permintaan dari pemangku kepentingan, hasil analisis kebutuhan para pemangku kepentingan (dengan memperhatikan hasil forum konsultatif, analisis berita, dan BPK mendengar), dan RKP.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU 6	
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	
Target	100,00%
Realisasi	100,00%
Capaian	100

IKU 6 menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. IKU 6 bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Tahun 2020 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum merencanakan pemeriksaan tematik lokal, sehingga realisasi IKU 6 di tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.7 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai cukup baik, yaitu sebesar 100,00%.

Tabel III.7-Perbandingan Realisasi IKU 6 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendorong pencapaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan seperti: pengembangan kapasitas pemeriksaan tematik lokal melalui sosialisasi tema dan fokus pemeriksaan tematik lokal kepada para pemeriksa sesuai rencana pemeriksaan tematik lokal yang tercantum dalam renstra Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	
Target	5,00
Realisasi	4,43
Capaian	88,60

IKU 7 mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IKU 7 bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Penilaian untuk IKU 7 berasal dari laporan hasil survei pengukuran indikator.

Realisasi IKU 7 tahun 2020 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan adalah sebesar 4,43 dari target sebesar 5,00. Realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 4,72 dan tahun 2018 sebesar 4,68. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik III.2 yang menggambarkan *trend* indeks implementasi nilai dasar BPK dalam tiga tahun terakhir.

Grafik III.2- *Trend* Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dalam Tiga Tahun Terakhir



Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.8 menunjukkan bahwa realisasi IKU 7 ini terhadap target tahun 2024 belum tercapai baik yaitu sebesar 88,60%.

Tabel III.8-Perbandingan Realisasi IKU 7 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,43	88,60%

Untuk meningkatkan pencapaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan sosialisasi terkait penyeragaman pemahaman, persepsi pengertian, dan implementasi dari visi, misi, dan nilai dasar BPK melalui pengarahan dari Kepala Perwakilan maupun Pimpinan BPK yang datang dalam rangka kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, terkait IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terdapat program inovasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Go-Silah (Gowes Silaturahmi). Inovasi ini berupa kegiatan bersepeda Kepala Perwakilan dan para pegawai dengan berkunjung ke rumah-rumah pegawai. Program ini dilaksanakan setiap minggu dengan tujuan untuk melihat kondisi pegawai di lingkungan rumahnya. Hal ini dapat menjadi *awareness* manajemen dalam bentuk *know your employee*, dengan melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari pegawai serta melihat langsung gaya hidupnya apakah sudah sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8	
Hasil Evaluasi AKIP	
Target	A (86,00)
Realisasi	AA (94,41)
Capaian	105

IKU 8 merupakan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. IKU 8 bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Berdasarkan Hasil Evaluasi Itama atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penilaian sebesar 94,41 dan masuk kategori nilai “AA”. Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP adalah sebesar 94,41 dari target sebesar 86,00.

Realisasi IKU 8 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 naik jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 dan tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik III.3 yang menggambarkan *trend* hasil evaluasi AKIP dalam tiga tahun terakhir.

Grafik III.3 – Trend Hasil Evaluasi AKIP dalam Tiga Tahun Terakhir



Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.9 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 109,78%.

Tabel III.9-Perbandingan Realisasi IKU 8 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU/IK		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	AA (94,41)	109,78%

Untuk mempertahankan pencapaian sesuai target BPK Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan kegiatan rutin strategis seperti peningkatan kapasitas satker dalam menyusun LAK satker melalui kegiatan pembinaan/*coaching* serta reuiu LAK satker dengan Itama dan Direktorat PSMK.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU 9	
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	
Target	95,00%
Realisasi	98,99%
Capaian	104,20

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (*SISDM*), serta layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. IKU 9 bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengukuran tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Biro TI. Di tahun 2020, realisasi IKU 9 sebesar 98,99% dari target sebesar 95,00%, dengan rincian realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan layanan dasar: 100,00%
- 2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: 95,95%
- 3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: 100,00%
- 4) Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan: 100,00%

Realisasi sebesar 98,99% di tahun 2020 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 99,10%, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018 sebesar 96,43%. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik III.4 yang menggambarkan *trend* tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dalam tiga tahun terakhir

Grafik III.4 - *Trend* Tingkat Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi dalam Tiga Tahun Terakhir



Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.10 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 104,20%.

Tabel III.10-Perbandingan Realisasi IKU 9 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	98,99%	104,20%

Untuk mempertahankan pencapaian realisasi IKU 9, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi TI di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga disertai himbauan oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai agar membudayakan pemanfaatan aplikasi internal dan penggunaan portal BPK dalam melaksanakan tugas harian.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU 10	
Tingkat Penerapan	Manajemen Pengetahuan
Target	100,00%
Realisasi	125,00%
Capaian	105

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Penilaian untuk IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan mencakup 3 hal yaitu: praktik terbaik (*best practice*), penerapan *best practice*, dan aktivitas manajemen pengetahuan.

Di tahun 2020, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan mengajukan 1 buah usulan *best practice* dengan judul “Aplikasi Pengaduan Masyarakat” berdasarkan nota dinas Kepala Perwakilan nomor 268/ND/XIX.MKS/09/2020 tanggal 15 September 2020. Berdasarkan nota dinas Kepala Direktorat PSMK nomor 667/ND/XII.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyampaian Penetapan Hasil Penilaian *Best Practice*, usulan tersebut dapat diakui sebagai capaian indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020.

Sedangkan untuk penerapan *best practice*, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan melalui nota dinas nomor 318/ND/XIX.MKS/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah menyampaikan *best practice* yang direplikasi yaitu *best practice* dengan judul “Wajah Baru PIK BPK Sumbar: Balai Basuo” sebagai capaian indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020.

Aktivitas manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan selama tahun 2020 telah disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Aktivitas

Knowledge Management tahun 2020 melalui nota dinas Kepala Perwakilan nomor 416/ND/XIX.MKS/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang memuat 2 aktivitas manajemen pengetahuan.

Berdasarkan kegiatan manajemen pengetahuan yang telah diterapkan selama tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh realisasi sebesar 125% dari target sebesar 100% yang terdiri dari:

- 1) Tingkat Penyusunan *Best Practice*: 100%
- 2) Tingkat Penerapan *Best Practice*: 100%
- 3) Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan: 200%

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya. Tingkat penyusunan *best practice* dan tingkat penerapan *best practice* merupakan IKU tersendiri di tahun-tahun sebelumnya, sedangkan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan baru diukur sebagai sub iku di tahun 2020 ini.

Perbandingan realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.11 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 125,00%.

Tabel III.11-Perbandingan Realisasi IKU 10 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerapan manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best Practice* tersebut merupakan setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*;
- 2) Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi,

kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

- 3) Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran terkait IKU 10, aplikasi pengaduan masyarakat yang diajukan sebagai usulan *best practice* pada implementasinya menggunakan sarana prasarana yang berasal dari perangkat *computer existing* dan memanfaatkan jaringan LAN kantor perwakilan. Aplikasi pengaduan masyarakat dibangun sendiri oleh internal kantor dengan menggunakan *hardware* yang sudah ada.

Sedangkan untuk pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan selama tahun 2020 efisiensi penggunaan anggaran diimplementasikan pada saat dilakukan dua kali forum berbagi pengetahuan dengan pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah menyelesaikan pelatihan sebagai narasumber, serta menggunakan sarana serta prasarana yang telah tersedia di perwakilan.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU 11	
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	
Target	3,80
Realisasi	3,55
Capaian	93,42

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU 11 bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Penilaian untuk IKU 11 berasal dari Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang dilakukan oleh pihak independen kepada para pemangku kepentingan. Realisasi IKU 11 tahun 2020 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan adalah sebesar 3,55 dari target sebesar 3,80.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.12 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 belum tercapai baik, yaitu sebesar 93,42%.

Tabel III.12-Perbandingan Realisasi IKU 11 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,55	93,42%

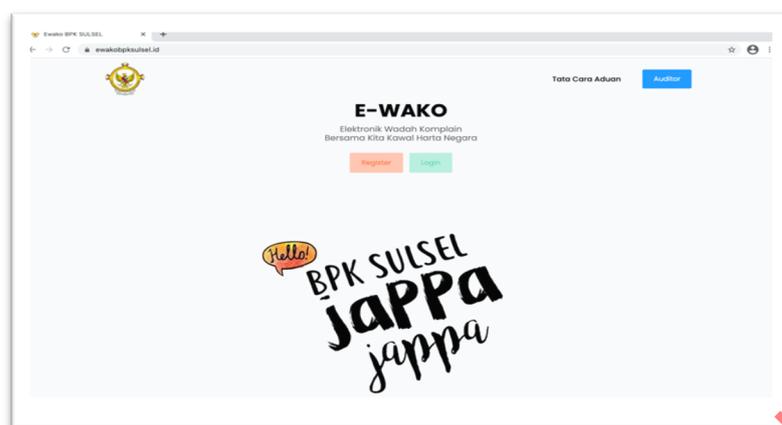
Pencapaian target ini dipengaruhi objektivitas penilaian dari pihak eksternal dhi. para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan capaian tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Peningkatan kegiatan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap BPK melalui kegiatan seperti forum pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik yang bersifat tahunan (kepada semua elemen pemangku kepentingan) maupun parsial kepada setiap pemangku kepentingan;
- 2) Peningkatan kualitas komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan seperti: responsif terhadap aduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, serta meningkatkan pelayanan pada Pusat Informasi dan Komunikasi Perwakilan,.

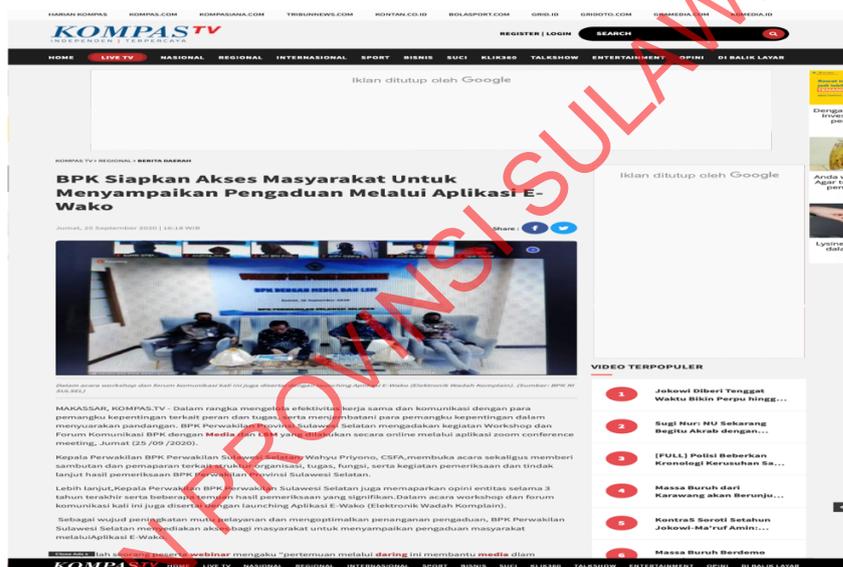
Di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meresmikan aplikasi E-Wako (Elektronik Wadah Komplain) sebagai bentuk sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan secara *online*. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian pengaduan para pemangku kepentingan terutama di tengah kondisi pandemi seperti ini. Selain itu, melalui aplikasi ini para pemangku kepentingan yang menyampaikan pengaduannya bisa ikut memantau proses tindak lanjut pengaduan, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Respon yang cepat dan tepat dalam proses tindak lanjut terhadap pengaduan akan meningkatkan citra positif BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar III.1 – Screenshot Aplikasi E-Wako



Gambar III.2 – Pemberitaan Peluncuran Aplikasi E-Wako di Media Online



Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran terkait IKU 11, sumber daya yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini *free* atau tidak berbiaya, karena aplikasi E-Wako merupakan pengembangan dari aplikasi pengaduan yang telah digunakan secara internal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU 12	
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	
Target	100,00%
Realisasi	100,00%
Capaian	100

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut : Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN), dan standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014). Berdasarkan ketentuan tersebut maka standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa. IKU 12 bertujuan untuk mendorong

pelaksanaan tuis dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Selama tahun 2020 dari total 149 pegawai (pemeriksa dan non pemeriksa), seluruhnya telah memenuhi standar pengembangan kompetensi. Sehingga realisasi IKU 12 tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Di tahun-tahun sebelumnya IKU Pemenuhan Jam Diklat dipisah antara pemeriksa dan non pemeriksa masing-masing terdiri dari IKU Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa). Di tahun 2020 ini, kedua IKU tersebut menjadi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang baru diukur saat ini, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.13 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2024 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 100%.

Tabel III.13-Perbandingan Realisasi IKU 12 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mempertahankan pencapaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan monitoring diklat pegawai secara bulanan yang dilaksanakan oleh Subbagian SDM sebagai LO diklat perwakilan. Monitoring diklat yang dilakukan Subbagian SDM selain sebagai pemantauan jam diklat para pegawai, juga sebagai dasar untuk menentukan urutan prioritas usulan diklat berdasarkan jam diklat yang telah dikumpulkan di tahun berjalan. Selain itu, Subbagian SDM juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pusdiklat untuk menyelenggarakan diklat *in house training* sesuai dengan kebutuhan diklat yang diperlukan oleh perwakilan.

IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran

IKU 13	
Tingkat Kinerja Anggaran	
Target	87,00%
Realisasi	92,25%
Capaian	105,00

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA)

mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Sedangkan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKU 13 bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Penilaian untuk IKU 13 berasal dari Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran (Biro Keuangan).

Realisasi IKU 13 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah sebesar 92,25% yang terdiri atas:

1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA): 90,97%
2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA): 94,16%

Grafik III.5 - *Trend* Tingkat Kinerja Anggaran dalam Tiga Tahun Terakhir



Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap target dalam rencana implementasi renstra tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel III.14 menunjukkan bahwa realisasi IKU ini terhadap target tahun 2022 sudah tercapai baik, yaitu sebesar 106,03%.

Tabel III.14-Perbandingan Realisasi IKU 13 Tahun 2020 dengan Target 2024 sesuai Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

IKU		Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	100%	106,03%

Untuk mempertahankan pencapaian ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan rutin strategis melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan juga peningkatan kualitas pemantauan pelaksanaan anggaran sehingga pemanfaatan anggaran bisa optimal.

Selama tahun 2020, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan efisiensi anggaran, antara lain:

- 1) Efisiensi pada Belanja Keluaran LHP sebesar Rp776.505.000,00 dan Efisiensi pada keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan Rp56.610.000,00 (Revisi Pagu I);
- 2) Efisiensi pada Belanja Keluaran LHP sebesar Rp2.139.359.000,00 dan Efisiensi pada keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan Rp372.105.000,00 (Revisi Pagu II);
- 3) Efisiensi pada Belanja Pegawai sebesar Rp1.005.814.000,00 (Revisi Pagu IV).

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran awal Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp36.802.032.000,00 mengalami beberapa revisi menjadi **Rp33.212.043.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15-Revisi Pagu Anggaran TA 2020

Keterangan	Pagu Awal	Pagu Anggaran (Revisi)	Keterangan
Pagu Awal	Rp36.802.032.000,00		
Revisi Pagu I		Rp35.968.917.000,00	Efisiensi pada Belanja Keluaran LHP sebesar Rp776.505.000,00 dan keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan Rp56.610.000,00.
Revisi Pagu II		Rp33.674.837.000,00	Efisiensi pada Belanja Keluaran LHP sebesar Rp2.139.359.000,00 dan keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan Rp372.105.000,00. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp217.384.000,00.
Revisi Pagu III		Rp34.217.857.000,00	Penambahan anggaran Belanja Modal sebesar Rp543.020.000,00 berupa renovasi gedung dan bangunan.
Revisi Pagu IV		Rp33.212.043.000,00	Efisiensi pada Belanja Pegawai sebesar Rp1.005.814.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp30.322.992.442,00**. Adapun rincian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.16-Anggaran dan Realisasi TA 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020	Persentase Realisasi
A	Rencana Kegiatan Pemeriksaan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	12.579.294.000,00	11.255.579.991,00	89,48%
1	LHP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	4.858.381.000,00	4.429.535.023,00	91,17%
2	LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK	669.238.000,00	393.727.037,00	58,83%
3	LHP Banpol	385.627.000,00	290.583.900,00	75,35%
4	LHP Interim/Pendahuluan	3.660.713.000,00	3.491.002.161,00	95,36%
5	Rumusan Bahan Pendapat	8.305.000,00	-	0,00%
6	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1.778.746.000,00	1.720.106.448,00	96,70%
7	Sumbangan IHPS	152.652.000,00	56.422.526,00	36,96%
8	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	964.662.000,00	834.081.896,00	86,46%
9	Laporan Profil Entitas	100.970.000,00	40.120.000,00	39,73%
B	Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (1+2+3)	20.632.749.000,00	19.067.412.451,00	92,41%
1	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.498.794.000,00	1.304.297.241,00	87,02%
2	Layanan Internal <i>Overhead</i>	3.385.304.000,00	3.298.941.950,00	97,45%
3	Layanan Perkantoran	15.748.651.000,00	14.464.173.260,00	91,84%
	TOTAL (A+B)	33.212.043.000,00	30.322.992.442,00	91,30%

C. Evaluasi atas Capaian IKU 2019

Secara garis besar, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dalam pencapaian skor kinerja, yang terlihat dari pencapaian skor kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 101,14 pada tahun 2019 menjadi sebesar 98,96 pada tahun 2020. Dari 13 target indikator kinerja yang ditetapkan, 6 indikator kinerja diantaranya telah melampaui target, 4 indikator kinerja mencapai target dan sebanyak 3 indikator kinerja belum mencapai target.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan telah mengidentifikasi dan menelaah kendala-kendala yang menjadi penyebab belum maksimalnya pencapaian kinerja pada tahun 2020. Hal tersebut terkait dengan beberapa IKU yang tidak tercapai target, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
Realisasi IKU 1 berasal dari penilaian 3 sub iku yaitu hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC), hasil evaluasi EPP, serta hasil reviu Itama. Untuk penilaian hasil QA dan QC, serta hasil reviu Itama diperoleh nilai 100%. Sedangkan untuk hasil evaluasi EPP hanya diperoleh 56%. Hal ini yang menyebabkan target IKU 1 tidak tercapai 100%.
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
Target IKU ini adalah nilai tertinggi (nilai 5 dalam skala 5) dari hasil survei, yang berarti tidak boleh ada kesalahan pada saat pengisian survei. IKU ini diukur sejak tahun 2018, dan selama periode pengukuran IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah mencapai target;
3. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi merupakan IKU yang baru diukur di tahun 2020. Realisasi IKU ini berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak surveyor independen kepada para pemangku kepentingan. Tahun ini realisasi IKU 11 sebesar 3,55 dari target sebesar 3,80.

Dalam mengantisipasi kendala-kendala maupun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020, Perwakilan Sulawesi Selatan telah mereviu dan menelaah serta merumuskan rencana aksi untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Untuk meningkatkan penilaian Evaluasi EPP terkait tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan *training* atau pun *coaching* untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa terkait penyusunan LHP;
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK, maka akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi/*workshop* atas pemahaman dan persepsi pengertian visi, misi, dan nilai dasar BPK;
3. Untuk mencapai target IKU 11, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik melalui kegiatan forum pertemuan dengan para pemangku kepentingan, maupun melalui peningkatan pelayanan informasi.

Selain rencana aksi tersebut, untuk mencapai target kinerja juga dilakukan pemantauan kegiatan tiap unit kerja secara periodik oleh Kepala Perwakilan sekaligus juga memantau *progress* capaian indikator kinerja unit kerja terkait. Koordinasi yang baik antara tim SIMAK/IKU Perwakilan dengan unit kerja juga diperlukan untuk mendorong pencapaian indikator kinerja perwakilan. Selain itu juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 dan juga sebagai sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kendala dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi BPK. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2020. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang. Selain itu, instrumen manajemen risiko juga diterapkan untuk menjaga setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan sasaran diidentifikasi dan dimitigasi sehingga berada dalam level yang dapat diterima manajemen.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdampak positif dalam mendukung visi misi BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berintegritas, independensi, dan profesional.

LAMPIRAN

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Target Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.212.043.000 • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp12.579.294.000 • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp20.632.749.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	78,00%	-	-
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	-	-
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	76,33%	75,34%	69,82%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,11%	-	-
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	-	-
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	-	-
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,43	4,72	4,68
	8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	94,41	92,89	79,85
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,99%	99,10%	96,43%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	125,00%	-	-
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,55	-	-
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	-	-
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	92,25%	88,83%	88,82%

Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020 dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024		
1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,00%	78,00%
2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	76,33%	97,85%
4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,11%	101,11%
5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,0	5,0	5,0	5,0	4,43	88,60%
8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	AA (94,41)	109,78%
9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	98,99%	104,20%
10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%
11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,55	93,42%
12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13 Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	92,25%	106,03%

Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Kerja Eselon II : Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.212.043.000 • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp12.579.294.000 • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp20.632.749.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	78,00%	78,00%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	76,33%	101,77%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,11%	101,11%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,43	88,60%
	8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00 (A)	94,41 (AA)	109,78%
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,99%	104,20%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	125,00%	125,00%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,55	93,42%
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	92,25%	106,03%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp33.212.043.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp30.322.992.442,00